



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WIRATNO
2. Jabatan : KEPALA BALAI
3. NHK : 209250

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.650.000.000

1. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 65.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/21 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 168 m2/70 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 355.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT HONDA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, HONDA HONDA HR-V RU1 Tahun 2019, HASIL SENDIRI
Rp. 350.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 8.600.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 87.108.970

F. HARTA LAINNYA Rp. 110.000.000

Sub Total Rp. 2.210.708.970

III. HUTANG Rp. 301.034.250

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.909.674.720

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HEDI MEDIANSYAH
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
3. NHK : 465445

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m²/56 m² di KAB / KOTA BOGOR,
HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 117.000.000

1. MOBIL, AVANZA G Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 211.071.314

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 828.071.314

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 828.071.314

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NUR MASLAHAH
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 207280

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	300.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 118 m2/96 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	168.000.000
1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000		
2. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	30.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	203.779.715
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	701.779.715

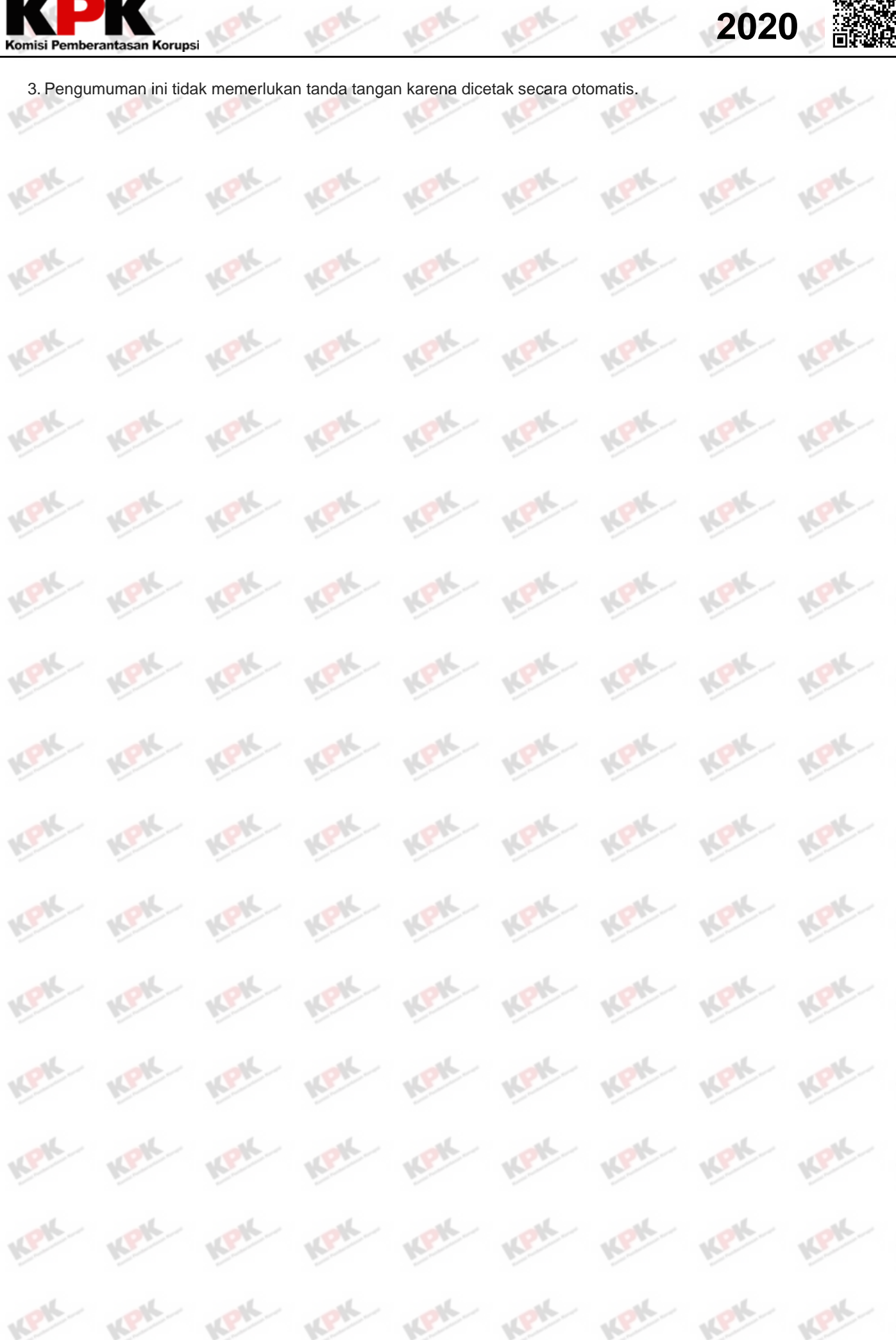
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	701.779.715

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WINITASARI
2. Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
3. NHK : 414535

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 475.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 176 m²/72 m² di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 131.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, KAWASAKI SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 29.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA1.3 VELOZ AT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 405.412.421

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.011.412.421

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.011.412.421

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : M A R Y U D I N
NIK : 3201291201650003
Lembaga : KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Kerja : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
Sub Unit Kerja : BALAI PENELITIAN TANAMAN REMPAH DAN OBAT
Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
Jenis Laporan : Periodik - 2020
Tanggal Kirim : 25 Februari 2021

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PUPUNG PURNAMAWATI
2. Jabatan : BENDAHARA PENERIMAAN
3. NHK : 225383

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 224.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/36 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 224.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 14.850.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000
2. MOTOR, HONDA X1B02R07L0 A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.400.000
3. MOTOR, YAMAHA 28D MIO AL1155A/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.700.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.430.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 26.622.584

F. HARTA LAINNYA Rp. 212.412

Sub Total Rp. 267.114.996

III. HUTANG Rp. 204.838.361

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 62.276.635

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.